

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto No. 40–42 Jakarta 12190
Kotak Pos 124

Telepon 5251609, 5250208, 5262880
Faksimili 52964484

Sifat : Sangat segera
Lampiran: 1 (Satu) set

7 September 2009

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor SE-85 /PJ.04/2009

TENTANG
RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-04/PJ.04/2009 TENTANG
INSENTIF JURUSITA PAJAK

Sehubungan terdapatnya kekeliruan pada isi dan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.04/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Insentif Jurusita Pajak, dengan ini dilakukan ralat dan penambahan sebagai berikut:

1. Angka 3 huruf c dan d tertulis:

"c. Untuk KPP yang tindakan penagihan tahun 2008 terdapat pencairan piutang hasil dari pelaksanaan lelang, maka terhadap Jurusita Pajak yang melaksanakan lelang dan namanya tercantum dalam Risalah Lelang, diberikan tambahan sama dengan 1(satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2008;

d. Untuk KPP yang tindakan penagihan tahun 2008 terdapat pencairan piutang hasil dari pemblokiran dan atau pelaksanaan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank, maka terhadap Jurusita Pajak yang melaksanakannya dan namanya tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, diberikan tambahan sama dengan 1 (satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2008".

Seharusnya:

"c. Untuk KPP yang tindakan penagihan tahun 2008 terdapat pencairan piutang hasil dari pelaksanaan lelang, maka terhadap Jurusita Pajak yang melaksanakan lelang dan namanya tercantum dalam Risalah Lelang, diberikan 1(satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2008 atau tambahan sama dengan 1(satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2008;

d. Untuk KPP yang tindakan penagihan tahun 2008 terdapat pencairan piutang hasil dari pemblokiran dan atau pelaksanaan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank, maka terhadap Jurusita Pajak yang melaksanakannya dan namanya tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, diberikan 1(satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2008 atau tambahan sama dengan 1(satu) kali Tunjangan Pokok bulan Desember 2008;

e. Terhadap Jurusita Pajak yang prestasi pencairan piutangnya termasuk kriteria sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d di atas dan berperan aktif membantu kegiatan penagihan pada periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, apabila dalam kurun waktu tersebut telah dimutasikan dan menduduki jabatan tertentu (misalnya fungsional pemeriksa atau *Account Representative*), maka dasar penghitungan besarnya insentif adalah Tunjangan Pokok bulan terakhir menduduki jabatan sebagai Jurusita Pajak".

2. Angka 9 tertulis:

"Insentif bagi Jurusita Pajak yang terdapat pada unit KPP Pratama dan berperan aktif membantu kegiatan penagihan pada periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, maka pemberian insentifnya berdasarkan penghitungan persentase pencairan piutang pajak dan piutang pajak bumi dan bangunan".

Seharusnya:

"Insentif bagi Jurusita Pajak yang terdapat pada unit KPP Pratama dan berperan aktif membantu kegiatan penagihan pada periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang pencairan piutang pajak dan piutang pajak bumi dan bangunan melebihi target yang ditetapkan, maka pemberian insentifnya dihitung berdasarkan penghitungan persentase pencairan piutang pajak dan piutang pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan".

3. Melakukan pembetulan Lampiran 1 dan 2 sebagaimana terlampir.

Untuk lebih memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipannya disatukan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.04/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Dengan ralat ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

Direktur Jenderal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Bagian Umum KPDJP.

Lampiran 1
Nomor SE- /PJ/2009
September 2009

REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK TAHUN 2008

NO	KPP	KANWIL	REALISASI PENCAIRAN
1	2	3	4
1	KPP Madya Jakarta Utara	Jakarta Utara	193%
2	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Jakarta Selatan	193%
3	KPP Pratama Kebumen	Jawa Tengah II	192%
4	KPP Wajib Pajak Besar Dua	Wajib Pajak Besar	191%
5	KPP Pratama Metro	Bengkulu & Lampung	186%
6	KPP Pratama Lhokseumawe	NAD	182%
7	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	Jakarta Pusat	175%
8	KPP Madya Sidoarjo	Jawa Timur II	173%
9	KPP Pratama Tarakan	Kaltim	173%
10	KPP Penanaman Modal Asing Lima	Jakarta Khusus	173%
11	KPP Pratama Serpong	Banten	172%
12	KPP Penanaman Modal Asing Dua	Jakarta Khusus	163%
13	KPP Wajib Pajak Besar Satu	Wajib Pajak Besar	163%
14	KPP Pratama Kayu Agung	Sumsel dan Babel	160%
15	KPP Pratama Sleman	DIY	158%
16	KPP Pratama Bogor	Jawa Barat II	155%
17	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	Jakarta Utara	154%
18	KPP Pratama Tangerang Barat	Banten	154%
19	KPP Pratama Pontianak	Kalimantan Barat	153%
20	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	Jakarta Pusat	150%
21	KPP Madya Denpasar	Bali	149%
22	KPP Madya Makassar	Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara	146%
23	KPP Pratama Tigaraksa	Banten	146%
24	KPP Pratama Singaraja	Bali	146%
25	KPP Pratama Kisaran	Sumatera Utara II	143%
26	KPP Pratama Bekasi Selatan	Jawa Barat II	143%
27	KPP Madya Bandung	Jawa Barat I	143%
28	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan	Jakarta Barat	142%
29	KPP Madya Medan	Sumatera Utara I	140%
30	KPP Madya Jakarta Barat	Jakarta Barat	139%
31	KPP Penanaman Modal Asing Satu	Jakarta Khusus	137%
32	KPP Madya Surabaya	Jawa Timur I	136%
33	KPP Pratama Badung Utara	Bali	134%
34	KPP Pratama Jatinegara	Jakarta Timur	133%
35	KPP Pratama Garut	Jawa Barat I	129%
36	KPP Pratama Rantau Prapat	Sumatera Utara II	126%
37	KPP Pratama Padang	Sumbar & Jambi	125%
38	KPP Madya Tangerang	Banten	124%
39	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Jakarta Pusat	124%
40	KPP Pratama Pangkalan Bun	Kalselteng	123%
41	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	Jakarta Selatan	123%
42	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	Jakarta Pusat	121%
43	KPP Pratama Bantul	DIY	120%
44	KPP Penanaman Modal Asing Enam	Jakarta Khusus	117%
45	KPP Perusahaan Masuk Bursa	Jakarta Khusus	116%
46	KPP Pratama Jakarta Tebet	Jakarta Selatan	115%
47	KPP Pratama Tasikmalaya	Jawa Barat I	115%
48	KPP Badan dan Orang Asing Dua	Jakarta Khusus	115%
49	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Jakarta Pusat	114%
50	KPP Pratama Blora	Jawa Tengah I	112%
51	KPP Pratama Jakarta Pancoran	Jakarta Selatan	112%
52	KPP Pratama Cibinong	Jawa Barat II	112%
53	KPP Pratama Pangkal Pinang	Sumsel & Babel	112%
54	KPP Pratama Wonosari	DIY	111%
55	KPP Madya Balikpapan	Kaltim	110%
56	KPP Pratama Tenggarong	Kaltim	110%
57	KPP Badan dan Orang Asing Satu	Jakarta Khusus	109%
58	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Jakarta Selatan	109%
59	KPP Penanaman Modal Asing Empat	Jakarta Khusus	108%
60	KPP Pratama Langsa	NAD	107%
61	KPP Pratama Tangerang Timur	Banten	107%
62	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jawa Barat I	105%
63	KPP Pratama Pati	Jawa Tengah I	105%
64	KPP Madya Malang	Jawa Timur III	104%
65	KPP Pratama Kendari	Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara	103%
66	KPP Pratama Barabai	Kalselteng	103%
67	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	Jakarta Khusus	103%
68	KPP Pratama Gresik Utara	Jawa Timur II	102%
69	KPP Madya Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	101%

Keterangan:

1. Data diambil Laporan Rincian Penambahan dan Pembayaran Tunggakan Pajak tahun 2008 dan Laporan Perkembangan Tunggakan PBB/BPHTB (KPL. 6.15) tahun 2008

2. Realisasi pencairan adalah realisasi pencairan piutang pbb/bphtb dan atau non pbb/bphtb

Lampiran 2
Nomor SE- /PJ/2009
September 2009

REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK TAHUN 2008

NO	KPP	KANWIL	REALISASI PENCAIRAN
1	2	3	4
1	KPP Pratama Cilacap	Jawa Tengah II	1661%
2	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	Jakarta Selatan	456%
3	KPP Pratama Banjarbaru	Kalselteng	415%
4	KPP Madya Bekasi	Jawa Barat II	399%
5	KPP Pratama Indramayu	Jawa Barat II	313%
6	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	Jakarta Pusat	307%
7	KPP Pratama Wates	DIY	290%
8	KPP Pratama Lubuk Linggau	Sumsel Babel	282%
9	KPP Pratama Cibitung	Jawa Barat II	268%
10	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	Jakarta Pusat	267%
11	KPP Pratama Bekasi Utara	Jawa Barat II	262%
12	KPP Pratama Purworejo	Jawa Tengah II	261%
13	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	Jakarta Selatan	247%
14	KPP Madya Palembang	Sumsel dan Babel	238%
15	KPP Pratama Cilandak	Jakarta Selatan	231%
16	KPP Pratama Madiun	Jatim II	228%
17	KPP Madya Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	217%
18	KPP Pratama Sumedang	Jawa Barat II	209%
19	KPP Pratama Cikarang Selatan	Jawa Barat II	207%
20	KPP Madya Jakarta Timur	Jakarta Timur	207%
21	KPP Pratama Teluk Betung	Bengkulu dan Lampung	204%

Keterangan:

1. Data diambil Laporan Rincian Penambahan dan Pembayaran Tunggakan Pajak tahun 2008 dan Laporan Perkembangan Tunggakan PBB/BPHTB (KPL. 6.15) tahun 2008

2. Realisasi pencairan adalah realisasi pencairan piutang pbb/bphtb dan atau non pbb/bphtb

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran : 3
Surat Edaran Nomor : SE-85/PJ.045/200
Tanggal : 7 September 20
(CONTOH)

DAFTAR : PEMBAYARAN INSENTIF JURUSITA PAJAK
KANTOR :
BULAN PEMBAYARAN : OKTOBER 2009

NO	NAMA/NIP	ESELON	GOLONGAN	MASA KERJA GOLONGAN	SUSUNAN KELUARGA		DASAR PERHITUNGAN INSENTIF			INSENTIF JURUSITA PAJAK			TANDA TANGA
					TK K1 K2	TANGG	A. INSENTIF (..... x Tunjangan Pokok Bulan Desember 2008)	B. TAMBAHAN INSENTIF (.....x Tunjangan Pokok)	JUMLAH (8 + 9)	DASAR POTONGAN (10)	POTONGAN 15% x 11 (Gol III/a ke atas)	YANG DIBAYARKAN (11-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fauzan Imaduddin, SE., Ak NIP. 0600XXXXX	IV	III/b	12 TH	K2	3	3,450,000.00	6,900,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	1,552,500.00	8,797,500.00	1....................
2	Haifa Zahiyah, SST.Ak NIP. 0600XXXXX		III/a	7 TH	K1	-	3,140,000.00	6,280,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	1,413,000.00	8,007,000.00	2....................
3	Anita Nurihati Sofya NIP. 0600XXXXX		II/b	3 TH	-	-	2,140,000.00	4,280,000.00	6,420,000.00	0.00	0.00	6,420,000.00	3....................
4	Ana Khoirun Nisa NIP. 0600XXXXX		II/a	0 TH	-	-	1,950,000.00	3,900,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	4....................
	4 Pegawai						10,680,000.00	21,360,000.00	32,040,000.00	19,770,000.00	2,965,500.00	29,074,500.00	

Keterangan:
1. Insentif yang dibayarkan kepada pegawai yang pernah mendapatkan peringatan tertulis sesuai SK Menkeu No.: 15/KMK.01/UP.06/1985 atau sedang menjalani hukuman berdasar PP No. 30 Tahun 1980 agar disesuaikan.
2. Kolom 8 diisi sesuai angka 3a atau 3b atau 3c atau 3d dalam Surat Edaran ini
3. Kolom 9 diisi sesuai angka 3c dan atau 3d dalam Surat Edaran ini apabila pencairan piutangnya termasuk angka 3a atau 3b

Mengetahui
Kepala Kantor ....

....

.... Oktober 2009
Bendaharawan

....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....

Lampiran : 4
Surat Edaran No. : SE-85/PJ.045/2009
Tanggal : 7 September 2009
(CONTOH)

DAFTAR : SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
INSENTIF JURUSITA PAJAK
BULAN OKTOBER 2009

NO	URAIAN				PPh Ps.21 YANG DIHITUNG	PPh Ps.21 YANG DISETOR	INSENTIF YANG DIBAYARKAN	JUMLAH (7 + 8)	SISA (5 - 9)	KETERANGAN
		SISA TAHUN LALU	DROPING	JUMLAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.00	32,040,000.00	32,040,000.00	2,965,500.00	2,965,500.00	29,074,500.00	32,040,000.00	0.00	
		0.00	32,040,000.00	32,040,000.00	2,965,500.00	2,965,500.00	29,074,500.00	32,040,000.00	0.00	

.... 2009

Mengetahui
Kepala Kantor

Bendaharawan

....

....

Lampiran 5
SE- 85/PJ.04/2009
Tanggal 7 September 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL..
KANTOR ....

SURAT PERMINTAAN DROPING
INSENTIF JURUSITA
UNTUK KINERJA PENAGIHAN
PEMBAYARAN BULAN OKTOBER 2009

1.	Rencana pengeluaran insentif Jurusita bulan Oktober 2009 Dasar pembayaran :	Rp.	x,xxx,xxx.00
2.	Potongan PPh pasal 21 oleh KPDJP	Rp.	xxx,xxx.00 (-)
3.	Jumlah droping insentif yang diminta (1 – 2)	Rp.	x,xxx,xxx.00

4. Jumlah Jurusita Pajak aktif
per 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008:

4.1 Jumlah pegawai menurut jabatan			4.2 Jumlah pegawai menurut golongan		
Struktural	:	... Pegawai	Golongan IV	:	... Pegawai
Fungsional	:	... Pegawai	Golongan III	:	... Pegawai
Pelaksana	:	... Pegawai	Golongan II	:	... Pegawai
			Golongan I	:	... Pegawai
Harian Menunggu SK Capeg	:	... Pegawai	Harian Menunggu SK Capeg	:	... Pegawai
Jumlah	:	... Pegawai	Jumlah	:	... Pegawai

.... 2009
Kepala Kantor

....